

## BAB 3

### LATAR BELAKANG TERJADINYA PERTEMPURAN SURABAYA

#### 3.1 Perebutan Senjata Jepang

Berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tengah menyulut semangat para arek-arek Surabaya yang memiliki jiwa keprajuritan. Semangat itu semakin berkobar ketika muncul dan menyebar banyak surat selembaran yang berisi seruan agar rakyat Indonesia segera merebut kekuasaan dari tangan Jepang dan mengambil alih semua senjata perang milik para tentara Jepang. Menanggapi surat selembaran tersebut, para pemuda, baik mantan anggota PETA dan Heiho maupun arek-arek Surabaya, merasa terpanggil untuk bertindak. Mereka kemudian mendiskusikan kemungkinan bahwa Indonesia yang baru merdeka itu belum memiliki pasukan kebangsaan yang kuat.<sup>77</sup>

Bersatunya mantan anggota PETA dan arek-arek Surabaya merupakan wujud kekecewaan para pejuang Indonesia yang sebelumnya mengira bahwa Jepang akan membantu membentuk angkatan bersenjata Republik setelah berakhirnya Perang Dunia II. Namun, antara tanggal 20-23 Agustus 1945, pihak Jepang justru memanggil seluruh anggota tentara PETA yang telah mereka latih, dan memberikan perintah agar seluruh tentara PETA menyerahkan senjata mereka kepada Jepang. Setelah itu, mereka pun diperintahkan untuk membubarkan diri.<sup>78</sup>

Setelah berhasil mengambil senjata, pihak Jepang kemudian mengumumkan pembubaran PETA. Para prajurit PETA pun menyadari bahwa

---

<sup>77</sup> R.S. Achmad, *Surabaya Bergolak* (Jakarta: Haji Masagung, 1990). hlm 9.

<sup>78</sup> Frank Palmos, *Surabaya 1945: Sakral Tanahku* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016). hlm 163.

mereka telah diperdaya oleh Jepang untuk menyerahkan senjata mereka.<sup>79</sup> Tindakan ini dilakukan oleh Jepang demi memenuhi permintaan Sekutu, yang pada saat itu telah memenangkan Perang Dunia II. PETA, yang sebelumnya dibentuk oleh Jepang untuk membantu dalam peperangan jika Sekutu mendarat di Jawa, dianggap sudah tidak diperlukan lagi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Karena itu, Jepang merasa perlu membubarkan satuan-satuan PETA. Jepang mengetahui bahwa prajurit-prajurit PETA mendukung kemerdekaan Indonesia, dan mereka menganggap dukungan itu sebagai ancaman. Jepang pun khawatir, karena setelah kekalahannya, tugas mereka berubah menjadi menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia atas nama Sekutu. Oleh sebab itu, keberadaan PETA dinilai dapat menjadi bumerang bagi Jepang sendiri.<sup>80</sup>

Mantan prajurit PETA pada 22 Agustus 1945 di seluruh Jawa umumnya telah dipulangkan ke desa masing-masing. Namun, di Surabaya, hal ini berhasil dicegah oleh para perwira senior PETA. Mereka berhasil menahan anak buahnya yang hendak pulang, karena mereka tidak menerima keputusan pembubaran PETA. Sebagai tanggapan, para perwira senior PETA di Surabaya kemudian merencanakan pembentukan satuan tempur alternatif untuk menghadapi Jepang.<sup>81</sup> Para perwira tersebut sebenarnya telah membayangkan bahwa PETA kelak akan menjadi cikal bakal angkatan bersenjata Indonesia merdeka. Namun, di luar dugaan, Jepang justru membubarkan PETA dan melucuti mereka begitu saja.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Irna Hanny Nastoeti Hadi Soewito, *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan I* (Jakarta: Grasindo, 1994). hlm 15.

<sup>80</sup> Palmos, *Op. Cit.* hlm 164.

<sup>81</sup> Soewito, *Op. Cit.* hlm 15.

<sup>82</sup> Palmos, *Op. Cit.* hlm 164.

Para pelopor pejuang kemerdekaan yang memimpin pemerintahan Republik Indonesia menyadari dan menunjukkan kepekaan terhadap semangat juang bangsa Indonesia, yang saat itu didukung oleh para pemuda bekas prajurit PETA. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan, para pejuang telah merencanakan dan mempersiapkan segala hal untuk menyongsong kemerdekaan. Sebagai upaya untuk meneruskan semangat juang para pemuda, PPKI, dalam sidangnya pada 22 Agustus 1945, mencetuskan pendirian Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai langkah awal pembentukan kekuatan pertahanan nasional.<sup>83</sup>

Kendati tentara Jepang telah melucuti kembali senjata yang sebelumnya mereka serahkan kepada satuan-satuan PETA dan Heiho, pengumuman mengenai pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945 membangkitkan semangat tokoh-tokoh pemuda di berbagai daerah untuk mengambil alih kepemimpinan, baik dalam urusan pemerintahan sipil maupun militer. Di Surabaya, gerakan pemuda pun berkembang pesat, di mana mereka segera membentuk pasukan pertahanan kota sebagai wujud komitmen untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan.<sup>84</sup>

Semangat juang dan persatuan rakyat Surabaya mencapai puncaknya. Dalam waktu singkat, pengorganisasian para pejuang rakyat serta pengepungan terhadap gudang-gudang senjata milik Jepang berhasil dilakukan secara singkat. Gelora perlawanan pun menyebar hingga ke pelosok-pelosok kampung padat penduduk, tempat di mana sekitar setengah juta jiwa tinggal. Sikap masyarakat

---

<sup>83</sup> Achmad, *Op. Cit.* hlm 18.

<sup>84</sup> Batara R. Hutagalung, *10 November 45: Mengapa Inggris Membom Surabaya?* (Jakarta: INDOCAMP, 2018). hlm 67.

mulai menjadi agresif terhadap kehadiran tentara Jepang, mencerminkan pergeseran suasana dari ketundukan menjadi perlawanan terbuka.

Sebelum pasukan Inggris tiba di Indonesia, aksi perlawanan rakyat Surabaya terhadap Jepang sudah berlangsung secara terbuka. Tentara Jepang mulai diserang, senjata mereka dirampas, dan beberapa di antaranya dikeroyok oleh massa.<sup>85</sup> Menghadapi situasi tersebut, pihak Jepang cenderung bersikap pasif dan menahan diri. Mereka memilih berlindung di barak-barak dan hanya membalas serangan bila keselamatannya terancam.<sup>86</sup> Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menyebabkan semangat mereka menurun tajam, sehingga pelaksanaan tugas administrasi dan keamanan di Indonesia, termasuk Surabaya, menjadi terabaikan. Akibatnya, wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan Jepang mengalami kekosongan pengamanan, sementara pasukan Sekutu belum juga tiba.<sup>87</sup>

Keterlambatan kedatangan tentara Sekutu di Surabaya dimanfaatkan dengan baik oleh mantan prajurit PETA dan masyarakat setempat. Mereka segera merebut senjata dari tangan tentara Jepang, dengan maksud mengamankan persenjataan tersebut sebelum jatuh ke tangan Sekutu. Para bekas prajurit PETA, yang sebelumnya telah menyerahkan senjatanya kepada Jepang, kini justru bersemangat untuk merebut kembali senjata tersebut. Dorongan ini muncul karena

---

<sup>85</sup> Palmos, *Op. Cit.* hlm 164.

<sup>86</sup> Moehkardi, *Peran Surabaya Dalam Revolusi Nasional 1945* (Yogyakarta: UGM Press, 2023). hlm 43.

<sup>87</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 69.

situasi negara yang genting dan kebutuhan mendesak akan kekuatan pertahanan untuk menjaga keamanan nasional.<sup>88</sup>

Menghadapi semakin memanasnya situasi di Surabaya, pihak Jepang memanggil Ketua BKR Jawa Timur, Drg. Moestopo, untuk membahas perkembangan keadaan yang mulai tak terkendali. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak Jepang kemudian menginstruksikan seluruh kesatuan militernya di Jawa Timur untuk mengadakan perundingan dengan pihak BKR dalam rangka menyusun tata tertib dan menjaga ketertiban umum. Dalam perundingan berikutnya, Jenderal Iwabe Shigewe, selaku panglima angkatan darat Jepang di Jawa Timur, akhirnya menyetujui penyerahan seluruh persenjataan kepada pasukan Indonesia, dengan syarat adanya jaminan keselamatan bagi anggota pasukan Jepang yang telah menyerahkan diri. Langkah serupa juga dilakukan oleh Laksamana Muda Shibata, komandan pangkalan laut Jepang di Surabaya, yang menyerahkan seluruh persenjataan dan perlengkapan perang kepada pihak Indonesia.<sup>89</sup>

Instruksi Jenderal Iwabe dan Laksamana Muda Shibata umumnya dipatuhi oleh seluruh kesatuan tentara Jepang di Surabaya, kecuali oleh kesatuan Kempetai. Kesatuan ini tidak berada di bawah komando lokal, melainkan langsung tunduk kepada Markas Besar Tentara Jepang di Jakarta, sehingga tidak terikat pada perintah komando setempat.<sup>90</sup> Menghadapi situasi tersebut, Jenderal Iwabe akhirnya menyerahkan sepenuhnya kewenangan dan kebijakan penanganan

---

<sup>88</sup> Achmad, *Op. Cit.* hlm 21.

<sup>89</sup> Moehkardi, *Op. Cit.* hlm 44.

<sup>90</sup> *Ibid.* hlm 44.

masalah Kempetai kepada pimpinan BKR setempat, sebagai bentuk pengakuan terhadap otoritas lokal dalam menjaga stabilitas dan keamanan Surabaya.<sup>91</sup>

Setelah BKR berhasil memperoleh persenjataan, markas Kempetai di Surabaya menjadi target utama untuk segera dilumpuhkan oleh kekuatan BKR. Didorong oleh rasa dendam terhadap penjajahan Jepang, semangat para pemuda memuncak, disertai tekad kuat untuk menyerang markas Kempetai, yang saat itu berlokasi tepat di depan Kantor Gubernur Surabaya. Gelora perlawanan tersebut tidak dapat dibendung, mencerminkan luapan kemarahan yang telah lama terpendam.<sup>92</sup>

Rakyat Surabaya pada tanggal 1 Oktober 1945 bersama pasukan BKR mulai mengepung markas Kempetai yang terletak di depan Kantor Gubernur Surabaya.<sup>93</sup> Pasukan BKR, yang dipimpin oleh Abdul Wahab Saimin, bersama dengan arek-arek Surabaya, menggelar aksi pengepungan besar-besaran terhadap markas tersebut. Meski semangat tempur tentara Jepang telah melemah, kesatuan Kempetai yang masih bersenjata lengkap tidak menyerah begitu saja. Mereka melawan dengan sengit, membala serangan yang dilancarkan oleh para bekas prajurit PETA yang saat itu berjuang dengan semangat tempur yang tinggi dan tekad kuat untuk membebaskan Surabaya sepenuhnya dari sisa kekuatan Jepang.

Pertempuran sengit di markas Kempetai mengakibatkan banyak korban jiwa dari pihak gerakan massa yang berupaya merebut senjata dari tangan tentara Jepang. Dari insiden tersebut, tercatat sebanyak 40 orang tewas, yang terdiri atas

---

<sup>91</sup> Achmad, *Op. Cit.* hlm 22.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>93</sup> Di bekas Markas Kempetai yang telah hancur, sekarang dibangun Tugu Pahlawan. Moehkardi, *Op. Cit.* hlm 47.

25 warga Indonesia dan 15 tentara Jepang. Selain itu, korban luka-luka juga cukup banyak, yakni 60 orang dari pihak Indonesia, 14 orang Jepang, serta 2 warga Cina dan 5 warga Belanda.<sup>94</sup> Pemimpin penyerbuan, yakni Abdul Wahab Saimin, juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut, di mana kakinya tertembak saat memimpin serangan.<sup>95</sup>

Setelah pasukan BKR dan arek-arek Surabaya berhasil menghancurkan markas Kempetai, pertempuran meluas ke seluruh penjuru kota Surabaya. Pasukan BKR bahkan berhasil menguasai kendaraan militer Jepang, termasuk mobil dan tank-tank yang sebelumnya digunakan oleh pasukan penjajah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BKR Surabaya, baik yang berada di tingkat keresidenan maupun kota, telah mampu mengambil alih peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Surabaya. Kota ini sebelumnya merupakan pusat kekuatan utama militer Jepang di Indonesia, sehingga penguasaan terhadap senjata dan peralatan militer Jepang menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi BKR Surabaya.<sup>96</sup>

### **3.2 Peristiwa Hotel Oranje**

Pertengahan September 1945, para pemuda Surabaya yang masih bersemangat tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa, mulai menyoroti kedatangan rombongan RAPWI dari Jakarta. Rombongan ini, yang terdiri atas orang-orang Belanda dan Inggris, muncul tiba-tiba di Surabaya tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintahan Republik Indonesia setempat.

---

<sup>94</sup> Nugroho Notosusanto, *Pertempuran Surabaya* (Yogyakarta: Mutiara Sumber Widya, 1982). hlm 18.

<sup>95</sup> Achmad, *Op. Cit.* hlm 25.

<sup>96</sup> *Ibid.* hlm 26.

Alih-alih menjalin komunikasi dengan pihak Republik, mereka justru menghubungi otoritas militer Jepang di Surabaya, dengan alasan melaksanakan tugas sosial. Menurutnya kedatangan mereka adalah untuk menangani para tawanan perang, khususnya warga Belanda dan tahanan asing lainnya.<sup>97</sup>

Kedatangan rombongan RAPWI saat itu ditempatkan di Hotel Oranje, yang selama pendudukan Jepang telah diubah namanya menjadi Hotel Yamato. Keberadaan mereka di hotel tersebut justru membangkitkan kembali semangat dan ambisi kaum Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Situasi semakin memanas ketika sebuah pesawat Belanda menyebarkan selebaran yang berisi peringatan agar bersiap-siap menyambut kedatangan pasukan Sekutu dan tentara Belanda dalam waktu dekat. Tindakan ini memperkuat keberanian dan arogansi kelompok RAPWI, yang kemudian menunjukkan sikap provokatif terhadap pemerintah dan rakyat Republik Indonesia di Surabaya.<sup>98</sup> Puncaknya terjadi pada 19 September 1945, saat Ploegman, salah satu tokoh dalam rombongan RAPWI, mengibarkan bendera Merah-Putih-Biru (bendera Belanda) di atas tiang Hotel Oranje yang mereka duduki.<sup>99</sup>

Residen Sudirman, setelah mendapat laporan mengenai pengibaran bendera Belanda di Hotel Oranje, segera memerintahkan kepada pihak Belanda untuk menurunkan bendera Merah-Putih-Biru tersebut. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah, dan bendera Belanda tetap dibiarkan berkibar di atas hotel. Situasi memanas ketika Ploegman, salah satu tokoh Belanda, menodongkan pistol ke arah Residen Sudirman. Beruntung, seorang pemuda bernama Sidik

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>98</sup> Moehkardi, *Op. Cit.* hlm 32.

<sup>99</sup> Achmad, *Op. Cit.* hlm 13.

dengan sigap menendang tangan Ploegman, hingga senjata api itu terlepas dari genggamannya. Meskipun pistol sempat meletus, tidak ada korban akibat letusan tersebut.<sup>100</sup> Residen Sudirman kemudian dievakuasi keluar dari hotel oleh pengawalnya, sementara di dalam hotel, perkelahian sengit antara Sidik dan Ploegman terus berlangsung. Dalam peristiwa itu, Ploegman mengalami luka parah dan akhirnya tewas.<sup>101</sup>

Setelah insiden penodongan terhadap Residen Sudirman, massa yang telah berkumpul di luar hotel langsung menyerbu masuk ke dalam hotel. Kericuhan pun terjadi, memicu perkelahian sengit antara massa rakyat dengan kelompok Belanda, yang mengakibatkan kedua belah pihak mengalami luka-luka. Di tengah kekacauan tersebut, seorang pemuda bernama Koesno Wibowo berhasil naik ke atap hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Di atas, ia bertemu dengan Hariono, yang saat itu berdiri di dekat tiang bendera. Koesno segera menarik tali bendera, dibantu oleh Hariono yang ikut membantu menurunkan bendera Belanda. Setelah bendera Merah-Putih-Biru berhasil diturunkan, Koesno menggigit bagian jahitan warna biru dan merobeknya, hingga yang tersisa hanyalah warna Merah dan Putih, simbol kemerdekaan Indonesia. Bendera Merah Putih itu kemudian langsung dikibarkan kembali di tiang hotel.<sup>102</sup> Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan rakyat Surabaya terhadap kembalinya kolonialisme Belanda, dan kemudian dikenal sebagai Peristiwa Bendera 19 September 1945.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 99.

<sup>101</sup> Bung Tomo (Sutomo), *Pertempuran 10 November 1945: Kesaksian & Pengalaman Seorang Aktor Sejarah* (Jakarta: Visi Media, 2008). hlm 21.

<sup>102</sup> Moehkardi, *Op. Cit.* hlm 34.

<sup>103</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 100.

### 3.3 Pendaratan Tentara Sekutu

Setelah Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, Perang Dunia II pun resmi berakhir. Dalam kekosongan kekuasaan yang terjadi di wilayah-wilayah jajahan Jepang, termasuk Hindia Belanda, muncul kekuatan baru yang diutus oleh pihak Sekutu untuk mengambil alih pemerintahan sementara. Pasukan ini dikenal sebagai Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI), yang berada di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tujuan utama dari kedatangan AFNEI adalah menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, membebaskan tawanan perang Sekutu, menjaga stabilitas keamanan, serta membantu mengembalikan pemerintahan sipil Belanda melalui lembaga NICA (Netherlands Indies Civil Administration).<sup>104</sup>

Pendaratan pertama pasukan Sekutu di Indonesia terjadi pada 15 September 1945, ditandai dengan kedatangan Laksamana Muda Wilfred R. Patterson yang tiba di Jakarta dengan kapal perang H.M.S. Cumberland. Dalam rombongan tersebut, turut serta Dr. Olke van der Plas, mantan Gubernur Jawa Timur pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang kini datang sebagai wakil dari NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Selain itu, rombongan juga terdiri dari sejumlah pejabat Belanda dan petinggi dari Civil Affairs.<sup>105</sup>

Beberapa hari setelah pendaratan Sekutu di Jakarta, sejumlah perwira Belanda di bawah pimpinan Ir. D.L. Asjes dikirim dari Singapura menggunakan pesawat untuk diperbantukan ke pusat RAPWI. Pada 18 September 1945,

---

<sup>104</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010). hlm 68.

<sup>105</sup> Benedict Anderson, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang Dan Perlawanan Di Jawa 1944-1946* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988). hlm 157.

beberapa anggota RAPWI lainnya diterjunkan melalui udara di wilayah Gunungsari, Surabaya. Mereka ditugaskan untuk menjalin kontak dengan pimpinan Sekutu dan perwakilan Belanda yang akan datang. Setibanya di Surabaya, pihak Jepang saat itu menempatkan anggota RAPWI tersebut di Hotel Oranje.<sup>106</sup> Namun, rombongan ini tidak melapor terlebih dahulu kepada pemerintahan Republik Indonesia yang sudah terbentuk di Surabaya.<sup>107</sup>

Kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia terjadi secara bertahap di berbagai wilayah penting. Di Batavia (kini Jakarta), pasukan pertama mendarat pada 29 September 1945. Untuk melaksanakan misi Sekutu di wilayah Indonesia, Laksamana Lord Louis Mountbatten selaku Panglima Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara membentuk komando militer khusus bernama AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies). Komando AFNEI, yang awalnya dipimpin oleh Rear Admiral Sir Wilfred Patterson, kemudian digantikan oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, panglima Divisi ke-15 Angkatan Darat Inggris, sebagai komandan baru AFNEI di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, AFNEI mengerahkan tiga divisi utama ke wilayah Indonesia, yaitu:

1. Divisi ke-5 di bawah komando Mayor Jenderal Robert C. Mansergh, yang ditugaskan di wilayah Jawa Timur.
2. Divisi ke-23 di bawah Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawthorn, yang bertanggung jawab atas wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

---

<sup>106</sup> Pada saat pendudukan jepang Hotel Oranje berganti nama menjadi Hotel Yamato.

<sup>107</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 111.

3. Divisi ke-26 di bawah Mayor Jenderal H.M. Chambers, yang ditugaskan untuk wilayah Sumatera.<sup>108</sup>

Secara resmi, tugas pasukan sekutu adalah:

1. Menerima penyerahan tentara Jepang
2. Membebaskan para tawanan serta interniran Sekutu yang ditahan oleh Jepang
3. Melucuti tentara Jepang serta mengatur pulang kembali ke negaranya
4. Meciptakan keamanan dan ketertiban untuk kemudian diserahkan kepada penguasa sipil
5. Mengumpulkan tentang keterangan para kriminal perang dan menghadapkan mereka di depan pengadilan.<sup>109</sup>

Namun, di kemudian hari terungkap bahwa Tentara Inggris yang bertugas di bawah bendera Sekutu juga membawa misi rahasia, yaitu mengembalikan kekuasaan atas Indonesia kepada pihak Belanda sebagai jajahan.<sup>110</sup> Kedatangan pasukan Sekutu yang disertai agenda kolonial Belanda ini segera memicu penolakan keras dari rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Puncak dari resistensi nasional tersebut terjadi di Surabaya, yang kelak menjadi pusat perlawanan besar rakyat Indonesia terhadap kembalinya kekuasaan asing, sekaligus menandai salah satu babak paling heroik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 107.

<sup>109</sup> Heru Sukardi and Dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur* (Jakarta: Tumaritis, 1991). hlm 107.

<sup>110</sup> Hutagalung, *Op. Cit*. hlm 105.

### 3.4 Lahirnya Resolusi Jihad

Munculnya Resolusi Jihad tidak dapat dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration) menjadi momentum penting yang membangkitkan semangat perlawanan umat Islam. Ancaman kembalinya penjajahan membangkitkan kesadaran kolektif untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Dalam situasi yang penuh ketegangan itu, umat Islam terdorong untuk turut serta dalam perjuangan dengan mengerahkan pikiran, tenaga, bahkan jiwa dan raga. Respons atas situasi ini kemudian mendorong para tokoh Islam, khususnya dari kalangan ulama, untuk menyuarakan fatwa dan seruan jihad. Puncaknya, pada 22 Oktober 1945, lahirlah Resolusi Jihad, sebagai bentuk seruan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan kembali.<sup>111</sup>

Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 21–22 Oktober 1945, mengumpulkan para ulama serta konsul-konsul Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah untuk membahas langkah strategis menghadapi situasi genting pasca-kemerdekaan. Tokoh ulama NU se-Jawa dan Madura berkumpul. Perkumpulan ini terletak di Jalan Bubutan VI/2 Surabaya atau tepatnya di kantor PB Ansor Nahdlatul Oelama (ANO). Kiai Bisri Syansuri dan Kiai Wahab Hasbullah diutus untuk menyebarkan undangan untuk pertemuan itu.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Muhammad Rijal Fadli and Bobi Hidayat, *K.H. Hasyim Asy'ari Dan Resolusi Jihad: Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945* (Lampung: Laduny, 2018). hlm 73.

<sup>112</sup> Ayuhanafiq, *Garis Depan Pertempuran Lasykar Hizbulah 1945-1950* (Yogyakarta: Azzagrafika, 2013). hlm 54.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu berfokus pada pembahasan status hukum negara Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam diskusi tersebut, para ulama meninjau secara mendalam dari perspektif fikih Islam. Hasilnya, disepakati bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sah secara hukum Islam (fikih), karena menjamin kebebasan beragama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, para ulama menyatakan bahwa umat Islam memiliki kewajiban syar'i untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.<sup>113</sup>

Kiai Hasyim Asy'ari terdorong untuk mengeluarkan sebuah fatwa penting yang dikenal sebagai Resolusi Jihad<sup>114</sup> pada tanggal 22 Oktober 1945. Fatwa ini lahir sebagai bentuk tanggapan terhadap situasi genting saat itu, di mana pasukan Sekutu yang diboncengi oleh NICA berupaya mengembalikan Indonesia ke dalam cengkeraman kolonialisme. Dalam resolusi tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia hukumnya *fardhu 'ain*<sup>115</sup> (wajib individu) bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Resolusi ini menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk bangkit, mengangkat senjata melawan penjajah, dan mempertahankan kedaulatan negara yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Resolusi Jihad bukan hanya fatwa keagamaan, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan

<sup>113</sup> Muhammad Rifa'i, *K.H. Hasyim Asy'ari Biografi Singkat 1871-1947* (Yogyakarta: Garasi, 2009). hlm 33.

<sup>114</sup> Fatwa jihad dan Resolusi Jihad dikeluarkan dalam waktu bersamaan. Perbedaannya adalah fatwa jihad ini disampaikan kepada para Nahdliyin dan umat Islam secara keseluruhan, sedangkan Resolusi Jihad disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia yang saat itu baru terbentuk.

<sup>115</sup> Dalam Resolusi Jihad NU, *Fardhu Ain* merujuk pada kewajiban agama yang bersifat individual dan mutlak bagi setiap Muslim untuk membela tanah air dari penjajah.

nasional, yang mengobarkan semangat jihad di kalangan umat Islam dan menjadi pemicu perlawanan rakyat, khususnya dalam pertempuran heroik di Surabaya.<sup>116</sup>

Lahirnya Resolusi Jihad dapat dikaitkan dengan teori jihad dalam Islam, yaitu kewajiban membela diri saat agama dan negara terancam. Resolusi ini menjadikan jihad sebagai fardhu ‘ain bagi umat Islam dalam menghadapi agresi Sekutu dan Belanda. Peran Kiai dalam mendukung resolusi tersebut mencerminkan pelaksanaan jihad secara menyeluruh, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun militer demi mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa. Hal ini sejalan dengan teori jihad yang dikemukakan oleh Abdurrahman Abdul Mun’im dalam *Rif’at Husnul Ma’afi*, menulis pengertian jihad menjadi empat, yaitu Mengarahkan segala kemampuan untuk memerangi orang kafir, Berjuang dari keragu-raguan dan godaan syahwat yang dibawa oleh setan, Berjuang dengan keyakinan yang teguh disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dengan cara mengajak pada yang ma’ruf dan meninggalkan kemungkaran kepada orang-orang fasik, dan Makna yang serupa dengan pengertian ketiga, namun lagi khusus lagi yaitu terhadap orang-orang kafir yang memerangi orang Islam.

### 3.5 Pendaratan Brigade 49 Di Surabaya

Brigade 49 di bawah komando Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Brigade ini diperkirakan terdiri dari sekitar 5.000 personel, termasuk pasukan Gurkha dari Nepal yang tergabung dalam rombongan tersebut. Awalnya, wilayah Jawa Timur seharusnya menjadi tanggung jawab Divisi 5, namun karena terjadi keterlambatan kedatangan, divisi

---

<sup>116</sup> Ahmad Nurhasim and Nur Khalik Ridwan, *Demoralisasi Khittah NU Dan Pembaharuan* (Yogyakarta: LKIS, 2004). hlm 21.

tersebut masih tertahan di Malaya. Sebagai gantinya, Brigade 49 yang merupakan bagian dari Divisi 23 yang sebenarnya ditugaskan untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dikirim lebih dulu ke Jawa Timur.<sup>117</sup>

Pemerintah Republik Indonesia di Surabaya pada awalnya menolak permintaan Inggris untuk mendarat, bahkan mengancam akan menembaki dengan meriam jika pasukan Sekutu tetap memaksakan diri masuk ke wilayah tersebut. Namun, karena perintah dari pemerintah pusat di Jakarta, akhirnya izin pendaratan diberikan kepada pasukan Inggris.<sup>118</sup> Meski demikian, kecurigaan segera muncul di kalangan rakyat Surabaya, karena mereka mencium keberadaan unsur NICA (Nederlandsch-Indische Civiele Administratie) dalam barisan pasukan Inggris. Kecurigaan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama di kalangan pemuda, yang menduga bahwa kedatangan Sekutu hanyalah dalih untuk membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Sementara itu, pemerintah pusat di Jakarta mencoba menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa pasukan Sekutu hanya bertugas untuk melucuti senjata Jepang, membebaskan tawanan perang dan interniran warga Eropa, serta memulangkan mereka ke negara asalnya.<sup>119</sup>

Perundingan antara para pemimpin Republik Indonesia di Surabaya dan pihak Sekutu berlangsung pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada hari yang sama, pasukan Sekutu mulai memasuki wilayah Surabaya hingga ke pelosok kota, dan menempati sejumlah gedung serta lokasi strategis yang direncanakan sebagai pos-pos pertahanan mereka. Pihak Indonesia memperkirakan bahwa pasukan Inggris

---

<sup>117</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 135.

<sup>118</sup> *Ibid.* hlm 136.

<sup>119</sup> Moehkardi, *Op. Cit.* hlm 66.

telah menduduki sekitar delapan titik penting di kota Surabaya, yang digunakan sebagai basis pertahanan militer. Ketegangan antara rakyat Surabaya dan pasukan Inggris pun mulai meningkat, terutama karena munculnya indikasi bahwa tujuan Sekutu bukan sekadar melucuti senjata tentara Jepang, melainkan juga berusaha melucuti persenjataan yang telah dikuasai oleh pasukan Indonesia di Surabaya.

“Setelah beberapa kali perundingan yang alot dan menegangkan, maka pada tanggal 25 Oktober pihak Inggris yang diwakili oleh Kolonel Plugh menyetujui, bahwa:

1. Pihak Inggris akan menghentikan gerakannya ke darat sampai garis 800 yard, dihitung mulai dari garis tambatan Tanjung Perak.
2. Komandan tertinggi Inggris, Brigadir Mallaby, diputuskan untuk besok pagi tanggal 26 Oktober 1945 pukul 09.00, secara resmi menemui Pemerintahan Republik Indonesia di Surabaya.

Pihak Indonesia berhasil memaksa Mallaby untuk menghadiri perundingan tanggal 26 Oktober yang sangat menentukan. Dalam perundingan pada tanggal 26 Oktober, Mallaby didampingi Kolonel Plugh dan Kapten Shaw, sedangkan di pihak Indonesia, Gubernur Suryo, Mayjen drg. Mustopo, Yasin, Komandan Polisi Istimewa, dll. Setelah dilakukan perundingan yang panjang dan alot, akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1945 dicapai kesepakatan yang isinya:

1. Yang dilucuti senjata-senjatanya hanya tentara Jepang.
2. Tentara Inggris selaku wakil Sekutu akan membantu Indonesia dalam pemeliharaan keamanan dan perdamaian.
3. Setelah semua tentara Jepang dilucuti, maka mereka akan diangkut melalui laut”.<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil perundingan antara pemimpin Indonesia dan pihak Sekutu, maka pada sore hari tanggal 26 Oktober 1945, tentara Inggris diberikan izin resmi untuk mendarat di Surabaya. Setelah itu, pasukan Inggris diizinkan bergerak menuju sejumlah lokasi yang menjadi tempat interniran warga Belanda dan tawanan Jepang, antara lain di kawasan Gubeng, Sawahan, Darmo, Bubutan, dan Ketabang.

---

<sup>120</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 138-139.

### 3.6 Ultimatum 27 Oktober dan Pertempuran 28-29 Oktober 1945

Situasi di Surabaya kembali memanas pada 27 Oktober 1945 sekitar pukul 11.00 siang, ketika sebuah pesawat Dakota milik Inggris yang datang dari Jakarta menjatuhkan selebaran di langit kota Surabaya.<sup>121</sup> Isi selebaran tersebut merupakan ultimatum yang memerintahkan penduduk Surabaya untuk menyerahkan seluruh senjata rampasan dari tentara Jepang kepada pasukan Inggris, dalam batas waktu 2 x 24 jam. Tindakan ini memicu kemarahan warga Surabaya, karena mereka menganggap perintah tersebut sebagai bentuk arogansi dan ancaman terhadap Republik Indonesia yang baru merdeka.

Jenderal Mallaby merasa terkejut ketika mengetahui isi selebaran yang disebarluaskan oleh pesawat Inggris, karena isinya bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak Inggris dan Indonesia pada 26 Oktober 1945. Pimpinan brigade Inggris menyatakan bahwa mereka terpaksa karena mendapat tekanan dari atasan mereka. Setelahnya, pasukan Inggris mulai menahan kendaraan dan menyita senjata milik pihak Indonesia, yang menyulut kemarahan rakyat Surabaya. Tindakan tersebut memperkuat dugaan bahwa Inggris berusaha membantu Belanda untuk kembali menjajah Indonesia.<sup>122</sup>

Pimpinan Divisi TKR Surabaya segera menggelar pertemuan untuk membahas berbagai pertimbangan strategis dan kemungkinan yang dapat terjadi akibat ultimatum dari pihak Sekutu. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyadari bahwa jika senjata diserahkan kepada Sekutu, maka kekuatan militer Indonesia akan melemah secara drastis karena kehilangan alat pertahanan.

---

<sup>121</sup> Moehkardi, *Op. Cit.* hlm 67.

<sup>122</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 146.

Namun, jika senjata tidak diserahkan, maka konsekuensinya adalah risiko besar, yakni ancaman akan ditembak di tempat oleh pasukan Sekutu.<sup>123</sup>

“Kubu Indonesia memperhitungkan, pihak Inggris tidak mengetahui kekuatan pasukan serta persenjataan lawannya. Sedangkan telah diketahui dengan jelas, bahwa kekuatan Inggris hanyalah satu brigade, atau sekitar 5.000 orang (beberapa data ada yang menyebut 6.000 orang). Artinya kekuatan musuh jauh di bawah kekuatan Indonesia di Surabaya dan sekitarnya, yang memiliki pasukan bersenjata kurang lebih 30.000 orang. Jenis senjata yang dimiliki mulai dari senjata ringan hingga berat, termasuk meriam dan tank peninggalan Jepang yang sebagian terbesar masih utuh. Selain kekuatan pasukan terbatas, pasukan Inggris yang baru 2 hari mendarat, dipastikan tak mengerti liku-liku kota surabaya”.<sup>124</sup>

Pemuda dan rakyat Surabaya, bersama TKR, memilih untuk menolak ultimatum yang disebarluaskan lewat selebaran oleh pasukan Sekutu. Alih-alih menyerahkan senjata, mereka justru menyatakan tekad bulat untuk mengusir pasukan Sekutu dari Tanah Air dan mengembalikan mereka ke negeri asal. Sebagai respons tegas, pada 28 Oktober 1945, Komandan Divisi TKR Surabaya, Mayor Jenderal Yonosewoyo, mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap pasukan Sekutu. Dengan dikeluarkannya perintah tersebut, pecahlah pertempuran antara TKR yang dibantu oleh laskar-laskar rakyat dan masyarakat Surabaya melawan kekuatan militer Sekutu. Pertempuran ini menjadi bentuk nyata perlawanan rakyat Indonesia terhadap ancaman kembalinya kekuasaan kolonial, karena pasukan Inggris yang datang ke Surabaya diketahui membawa serta unsur NICA, yang berniat memulihkan kekuasaan Belanda di Indonesia.<sup>125</sup>

Perlawanan rakyat Surabaya terhadap pasukan Sekutu berlangsung di luar dugaan dan perkiraan pihak Inggris. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi

<sup>123</sup> Roeslan Abdulgani, *100 Hari Surabaya Yang Menggemparkan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1974). hlm 30.

<sup>124</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 147.

<sup>125</sup> Achmad, *Op. Cit.* hlm 60.

yang dimiliki Sekutu mengenai kekuatan dan persenjataan pasukan Indonesia. Selama ini, sumber utama informasi mereka hanyalah pihak Belanda, yang pada kenyataannya tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan situasi di Indonesia, khususnya di Surabaya.

Keterbatasan informasi ini berakar dari kekalahan Belanda oleh Jepang pada 8 Maret 1942, yang menyebabkan Belanda ditawan dan kehilangan kendali atas wilayah Hindia Belanda. Para tawanan Belanda baru dibebaskan pada akhir Agustus 1945, sehingga selama lebih dari tiga tahun, Belanda tidak memiliki akses terhadap perkembangan di Indonesia. Akibatnya, pasukan Inggris tidak mendapat gambaran yang akurat tentang kekuatan militer dan semangat juang rakyat Indonesia, terutama di Surabaya.

Pos-pos pasukan Inggris yang berada di pusat kota Surabaya diserbu oleh pasukan Indonesia, sementara akses jalan menuju lokasi-lokasi tersebut diblokade. Untuk melemahkan pertahanan lawan, aliran air dan listrik ke pos-pos Inggris turut diputus. Selain itu, pengiriman bala bantuan serta pasokan logistik berhasil digagalkan oleh pasukan Indonesia.<sup>126</sup> Situasi ini dimanfaatkan secara maksimal oleh pejuang Indonesia untuk melumpuhkan pasukan Sekutu yang masih bertahan di pos-pos mereka. Serangan dilakukan dengan intensitas tinggi dan berhasil mengguncang pertahanan musuh, meskipun harus dibayar mahal dengan banyaknya korban jiwa di pihak Indonesia, khususnya dari kalangan laskar rakyat

---

<sup>126</sup> Moekardi, *Op. Cit.* hlm 69.

Surabaya, yang sebagian besar merupakan pejuang baru dalam pertempuran bersenjata.<sup>127</sup>

Berbekal semangat juang dan keberanian yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para pejuang berhasil mengguncang dan memukul mundur pasukan Sekutu. Pertempuran sengit ini berlangsung hingga tanggal 29 Oktober 1945, dengan kerugian besar di pihak Sekutu. Akibat tekanan hebat dari pasukan Indonesia, tentara Sekutu akhirnya mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah dan mengajukan permintaan untuk melakukan perundingan.

Perundingan antara pihak Republik Indonesia dan tentara Sekutu berlangsung pada 29 Oktober 1945. Presiden Soekarno, didampingi oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Amir Sjarifuddin, tiba di Surabaya untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak Inggris yang diwakili oleh Jenderal Mallaby.<sup>128</sup> Setelah proses perundingan selesai, Presiden Soekarno menyampaikan seruan melalui siaran radio pada malam harinya, meminta rakyat Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Kemudian, pada 30 Oktober 1945, tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Presiden Soekarno dan Jenderal Hawthorn dari pihak Sekutu.<sup>129</sup>

“Isi dari persetujuannya adalah:

1. TKR diakui, karena boleh membawa senjata.
2. Dibentuk badan penghubung (Kontak Biro) antara tentara Sekutu dan penguasa RI di Surabaya, yang beranggotakan orang-orang Indonesia dan beberapa perwira Inggris.
3. A. Daerah pelabuhan kota Surabaya akan dijaga oleh tentara Sekutu bersama TKR dan Polisi RI.

---

<sup>127</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 153.

<sup>128</sup> Moekardi, *Op. Cit.* hlm 70.

<sup>129</sup> Achmad, *Op. Cit.* hlm 62.

B. Daerah Darmo tempat tinggal orang Eropa dan kaum interniran akan dijaga oleh tentara Sekutu.

C. Daerah di luar kedua daerah tersebut di atas akan dijaga oleh orang-orang Indonesia”.<sup>130</sup>

### **3.7 Tewasnya Jenderal Mallaby dan Ultimatum 9 November 1945**

Pertempuran di Surabaya sejatinya belum benar-benar berakhir.<sup>131</sup> Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jangkauan komunikasi, sehingga informasi mengenai kesepakatan gencatan senjata belum tersebar secara merata. Di sejumlah wilayah kota, baku tembak masih berlangsung. Setelah perjanjian antara pihak Indonesia dan Inggris ditandatangani, rombongan Presiden kembali ke Jakarta, dan tugas koordinasi selanjutnya diserahkan kepada anggota Kontak Biro. Rapat pun dilanjutkan, dan akhirnya disepakati bahwa anggota Kontak Biro akan turun langsung ke lapangan untuk menengahi dan memantau area-area yang masih mengalami bentrokan.<sup>132</sup>

Rombongan Kontak Biro pada sore hari yang terdiri dari perwakilan Indonesia dan pihak Inggris termasuk Jenderal Mallaby segera bergerak menuju Gedung Lindeteves dan Internatio. Kedatangan mereka di lokasi tersebut berhasil meredakan baku tembak yang sebelumnya terjadi antara pasukan Indonesia dan tentara Inggris. Hal ini dimungkinkan karena kedua belah pihak telah menerima informasi terkait kesepakatan gencatan senjata.<sup>133</sup>

Setelah berhasil meredakan baku tembak di Gedung Lindeteves, rombongan dari pihak Indonesia dan Inggris melanjutkan perjalanan menuju Gedung Internatio, yang merupakan salah satu pos milik Inggris yang masih

---

<sup>130</sup> Abdulgani, *Op. Cit.* hlm 44.

<sup>131</sup> Achmad, *Op. Cit.* hlm 70.

<sup>132</sup> Moehkardi, *Op. Cit.* hlm 71.

<sup>133</sup> Achmad, *Op. Cit.* hlm 71.

bermasalah. Saat mereka tiba di lokasi, gedung tersebut telah dikepung oleh para pemuda. Usai melintasi Jembatan Merah, tujuh kendaraan yang mengangkut rombongan berhenti di depan gedung. Dari mobil, perwakilan Indonesia menyerukan agar baku tembak segera dihentikan.

Kapten Shaw, Mohammad Mangundiprojo, dan T.D. Kundang ditugaskan masuk ke dalam Gedung Internatio untuk menyampaikan hasil perundingan antara pihak Indonesia dan Inggris kepada tentara Inggris yang masih bertahan di dalam gedung. Sementara itu, Jenderal Mallaby menunggu di luar, di dalam mobil yang terparkir di depan gedung. Setelah beberapa saat di dalam gedung, T.D. Kundang keluar lebih dulu. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari arah gedung, memicu baku tembak antara pasukan Indonesia dan tentara Inggris yang berlangsung sekitar dua jam. Setelah baku tembak reda, sebuah ledakan keras terjadi. Mobil yang ditumpangi Jenderal Mallaby meledak dan hancur, menyebabkan Mallaby tewas dalam insiden tersebut.<sup>134</sup>

Tewasnya Jenderal Mallaby memicu kemarahan besar dari pihak Inggris. Sebagai respons atas peristiwa tersebut, Letnan Jenderal Philip Christison, Panglima Sekutu di Asia Tenggara, mengeluarkan sebuah maklumat pada tanggal 31 Oktober 1945, sebagai berikut

#### PERINGATAN KEPADA BANGSA INDONESIA

Pada tanggal 28 Oktober, sejumlah besar orang Indonesia yang bersenjata di Surabaya telah menyerang dengan tidak memberi peringatan atau melakukan provokasi terhadap pasukan Inggris yang mendarat dengan maksud melucuti senjata dan mengasingkan pasukan Jepang, menolong tawanan perang dan orang-orang yang diasinkan dan menjaga keamanan dan ketentraman di daerah yang mereka duduki.

---

<sup>134</sup> Hutagalung, *Op. Cit.* hlm 163.

Dengan demikian, orang-orang Indonesia itu melanggar perjanjian peletakan senjata buat sementara dan dengan sewenang-wenang telah membunuh Brigjend Mallaby yang pergi untuk berbicara dengan mereka. Sekiranya, orang-orang Indonesia yang melakukan tersebut bila tidak menyerah kepada pasukan saya, saya akan menggunakan Angkatan Laut, Darat, dan Udara beserta senjata modern terhadap mereka, sampai mereka hancur.

Kalau dalam tindakan ini, orang-orang Indonesia yang tidak bersalah, meninggal atau luka, maka tanggung jawab adalah kepada mereka yang melakukan kejahanatan seperti yang saya terangkan tadi.

Saya peringatkan kepada segenap bangsa Indonesia di seluruh Jawa, supaya mereka tidak menyangkutkan diri dengan golongan ekstrimis dan supaya bekerja sama dengan tentara saya. Karena jika kekerasan digunakan terhadap tentara saya, maka jawabannya juga kekerasan pula. Saya berniat teguh menjamin keamanan dan ketenteraman dan berharap kepada orang Indonesia yang baik untuk membantu saya.<sup>135</sup>

Menanggapi ancaman dari Letnan Jenderal Christison, pada malam 31 Oktober 1945, Presiden Soekarno menyampaikan pidato melalui RRI di Jakarta.<sup>136</sup> Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa Surabaya merupakan pusat kekuatan perjuangan, di mana TKR, pemuda, dan kaum buruh memiliki persatuan yang sangat kuat. Namun, kekuatan tersebut akan menjadi lebih besar jika rakyat dari daerah lain di Indonesia turut serta dalam perjuangan tersebut. Lebih lanjut, Presiden Soekarno menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia bukanlah tentara Sekutu, melainkan NICA, yang memiliki tujuan untuk mengembalikan Indonesia ke dalam kekuasaan kolonial Belanda.<sup>137</sup>

Suasana kota Surabaya menjadi tegang setelah ancaman yang disampaikan pada 31 Oktober 1945. Ketegangan meningkat ketika pihak Inggris mulai mendaratkan pasukan mereka di Pelabuhan Surabaya. Berbagai peralatan tempur seperti pesawat tempur, kapal-kapal perang, tank-tank, dan ribuan prajurit mulai

<sup>135</sup> Moekardi, *Op. Cit.* hlm 81-82.

<sup>136</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia-Jilid 2: Diplomasi Atau Bertempur* (Bandung: Angkasa, 1977). hlm 367.

<sup>137</sup> Moekardi, *Op. Cit.* hlm 82.

diterjunkan untuk menguasai kota. Pasukan Inggris juga memanfaatkan masa gencatan senjata untuk memindahkan warga sipil dan tahanan perang dari pusat kota. Pemindahan ini dilakukan dengan tujuan agar mereka terhindar dari dampak pertempuran sekaligus mencegah kemungkinan mereka disandera oleh pihak Indonesia.<sup>138</sup>

Penduduk Surabaya pada tanggal 1 hingga 9 November 1945, diliputi kecemasan dan ketidakpastian. Ancaman yang disampaikan oleh Letnan Jenderal Christison menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai sekadar gertakan, namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa ancaman tersebut bersifat serius dan nyata. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya ketika Mayor Jenderal Mansergh, atas nama pihak Sekutu, mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945.

#### Kepada Seluruh Penduduk Indonesia di Surabaya

Pada tanggal 28 Oktober 1945, orang-orang Indonesia di Surabaya dengan melakukan penghianatan serta tanpa sebab, secara mendadak menyerang tentara Inggris, yang sebenarnya datang untuk melucuti persenjataan tentara Jepang serta ingin memberikan pertolongan kepada para interniran yang ditawan Jepang dan selain itu, untuk menjaga ketenteraman serta keamanan setempat. Dalam pertempuran, beberapa orang tentara Inggris tewas, menderita luka parah bahkan hilang, tanpa bisa diketahui lagi jejaknya. Beberapa orang wanita dan anak-anak yang sedang dalam tawanan telah dibunuh. Begitu juga komandan pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Mallaby, dibunuh dengan kejam, saat dia sedang berusaha meneruskan perintah gencatan senjata, di tengah berkobarnya pertempuran. Meskipun sebelumnya orang-orang Indonesia telah berjanji untuk menghentikan pertempuran.

Aksi kekejaman tersebut di atas jelas bertentangan dengan perikemanusiaan dan kesopanan sehingga tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja, tanpa dijatuhi hukuman setimpal. Kecuali jika perintah saya berikut dipatuhi tanpa ditentang, dengan batas akhir pukul 06.00 pagi, tanggal 10 November 1945. Saya akan melakukan perintah ini dengan

---

<sup>138</sup> Palmos, *Op. Cit.* hlm 246.

dukungan seluruh kekuatan Angkatan Laut, Darat, dan Udara yang berada di bawah komando saya. Dengan demikian, orang-orang Indonesia yang tidak bersedia memenuhi perintah saya ini harus ikut bertanggung jawab atas pertumpahan darah yang sudah pasti akan terjadi

(Tertanda) Maj. Gen. R.C. Mansergh,  
Panglima Tentara Darat Sekutu,  
Jawa Timur 9 November 1945

Ultimatum dan tuntutan yang dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Mansergh, agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata mereka dengan cara mengangkat tangan sebagai tanda menyerah, justru menimbulkan kemarahan besar di kalangan pemuda Surabaya. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Respon atas ultimatum itu pun tidak datang dalam bentuk penyerahan, melainkan perlawanan sengit. Amarah rakyat meledak menjadi pertempuran besar yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran 10 November 1945 salah satu pertempuran paling dahsyat dan berdarah dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat* (Djakarta: Gunung Agung, 1966). hlm 345.